



RENCANA STRATEGIS

**TAHUN
2024 - 2026**

KESBANGPOL

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, teriring rasa syukur yang mendalam kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Sebagaimana kita ketahui, Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 3 (Tahun) tahun berupa konsep yang digunakan oleh SKPD untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwakarta,

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN PURWAKARTA**

YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP, M.SI
NIP. 19790402 199810 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Asset	18
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Bakesbangpol kabupaten dengan bakesbangpol provinsi jawa barat	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	54
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	56
4.1 Tujuan	56
4.2 Sasaran	56



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1.1	Strategi	60
5.1.2	Kebijakan	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	61
6.1	Rencana Program	61
6.2	Indikator Kinerja	61
6.3	Kelompok Sasaran	62
6.4	Pendanaan Indikatif	62
BAB VII	INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANGPOLLINMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA	72
BAB VIII	PENUTUP.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Development*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses “ menjadi” ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Character Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah dengan menggunakan pendekatan *preventiv* (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan *preventiv* dilakukan melalui serangkaian pelatihan / pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta bersama dengan jajaran / lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan pengajuan perubahan status, dikarenakan terjadi pandemic yang kemudian mempengaruhi pengajuan perubahan status Kesbangpol, hingga kemudian pada awal tahun 2021 pengajuan perubahan status telah selesai di proses dan awal tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah di tetapkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk dapat mengarahkan peningkatan kinerja serta pelayanan terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta agar sesuai dengan



apa yang di cita - citakan dan terhindar dari kekacauan (*Chaos*). Perubahan status Kantor menjadi badan ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Purwakarta untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan kemana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun kedepan untuk mencapai hasil dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (Tahun) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam penyusunan Renstra perlu memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat mencerminkan semangat demokratis, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Agar terjamin kesungguhannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diberikan maka harus membuat Renstra sebagai dokumen perencanaan yang selanjutnya dijadikan tolak ukur penilaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Perubahan status Kantor menjadi badan berpengaruh terhadap penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dimana penjabaran secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Rencana strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi Perangkat Daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah.



4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah.
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politik legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra Perangkat Daerah karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

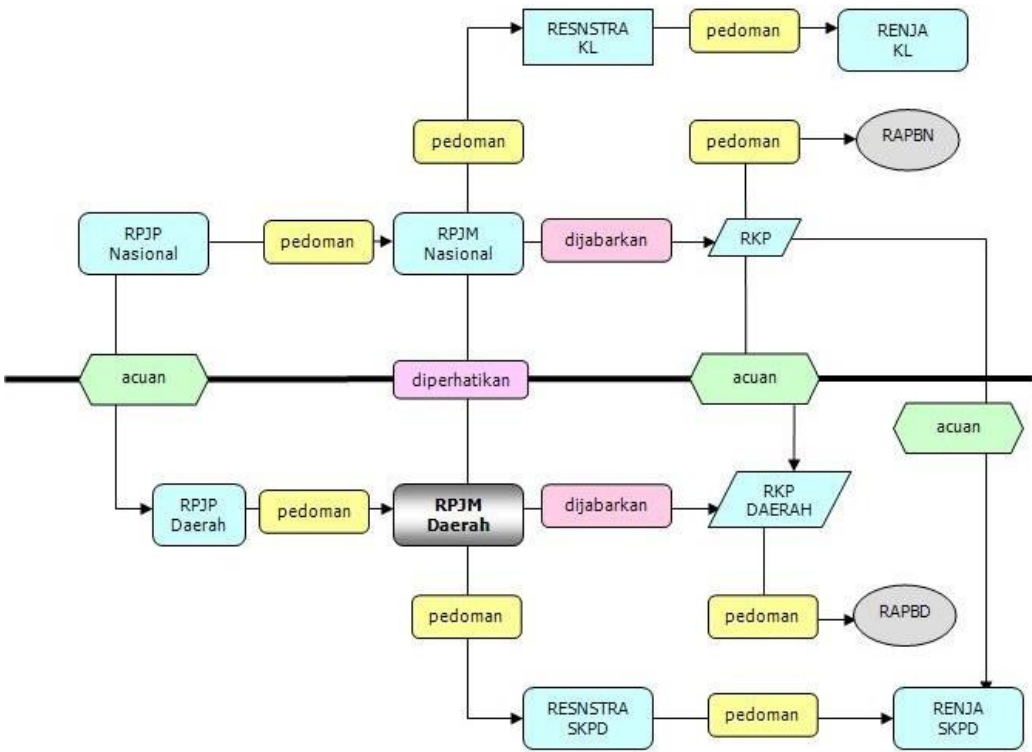
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya.

Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis Perangkat Daerah dengan perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD; RPJM provinsi.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
3. RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah /gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *Stakeholders* lain serta metode penjangkaran aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Perangkat Daerah untuk 3 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah).

Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra SKPD terkait dan harus mempedomani RPJMD, dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah melalui Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen - dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Keterkaitan
Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan





1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2000 Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang



Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 229 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Acara Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPJMD) 2018-2023
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
15. PERBUP Kab. Purwakarta No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 70 Tahun 2023 tentang Renstra Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk tiga tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi ;



5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu - Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini diuraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selama 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta lima tahun mendatang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu ditindak lanjuti dengan merevisi peraturan daerah agar selaras dengan peraturan pemerintah pusat, berdasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten setingkat Badan, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan tugasnya Bakesbangpol mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah, Yang Dipimpin Oleh Kepala Badan Yang Berkedudukan di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Purwakarta Melalui Sekretaris Daerah, Dengan Susunan Organisasi Badan, Terdiri Dari :



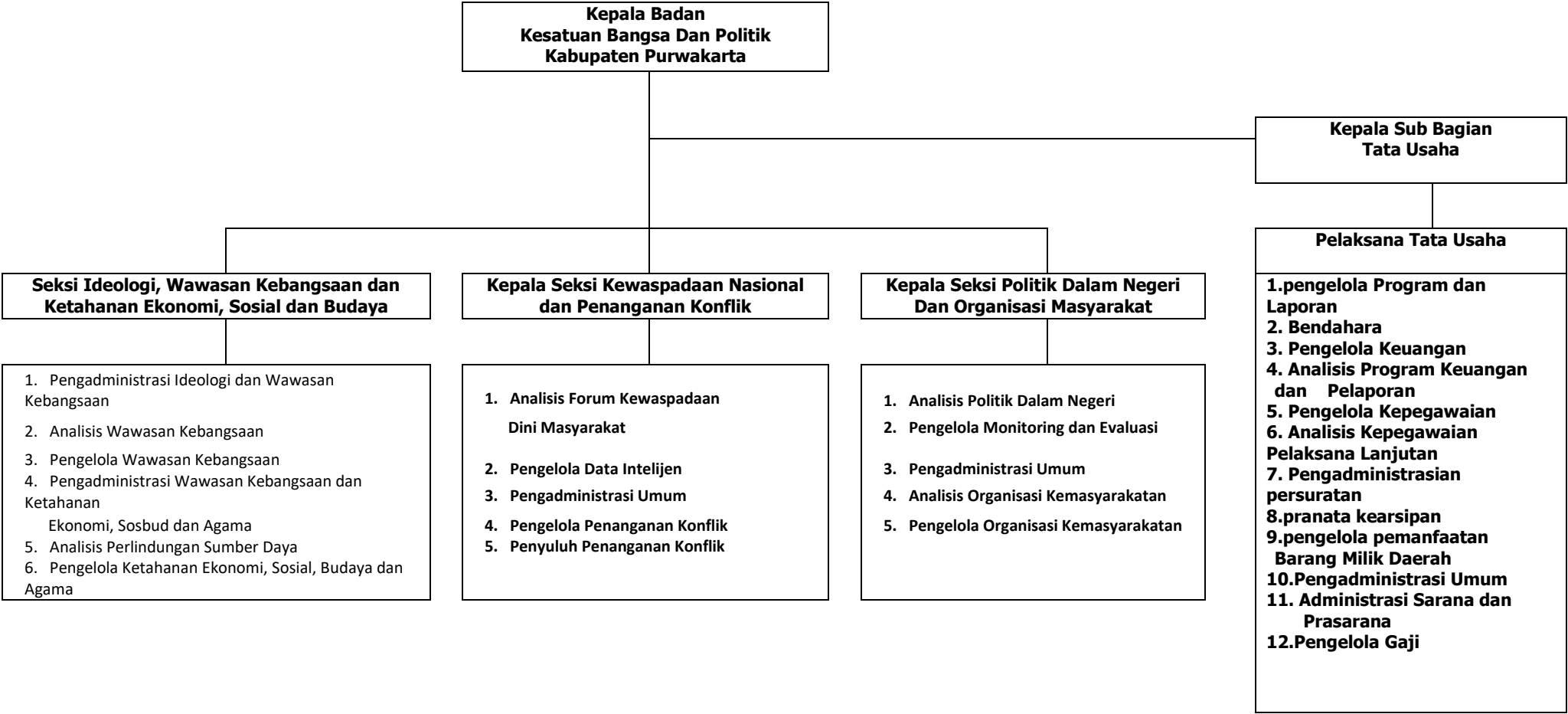
- a. Kepala Badan
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Pengelola Program dan Laporan
 - 2. Bendahara
 - 3. Pengelola Keuangan
 - 4. Analisis Program Keuangan dan Pelaporan
 - 5. Pengelola Kepegawaian
 - 6. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
 - 7. Pengadministrasian Persuratan
 - 8. Pranata Kearsipan
 - 9. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - 10. Pengadministrasian Umum
 - 11. Administrasi Sarana dan Prasarana
 - 12. Pengelola Gaji
- c. Seksi Wawasan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - 1. Pengadministrasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2. Analisis Wawasan Kebangsaan
 - 3. Pengelola Wawasan Kebangsaan
 - 4. Pengadministrasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
 - 5. Analisis Perlindungan Sumber Daya
 - 6. Pengelola Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - 1. Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - 2. Pengelola Data Intelijen
 - 3. Pengelola Penanganan Konflik
 - 4. Penyuluh Penanganan Konflik
- e. Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 - 1. Analisis Politik dalam Negeri
 - 2. Pengelola Monitoring dan Evaluasi
 - 3. Pengadministrasi Umum
 - 4. Analisis Organisasi Kemasyarakatan
 - 5. Pengelola Organisasi Kemasyarakatan



Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta didukung oleh aparatur sebanyak 13 pegawai.

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, Pangkat / Gol.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kepala Badan	1		1
	Sub Bagian Tata Usaha	3	4	7
	Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	2		2
	Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1		1
	Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	2		2
Jumlah Total				13
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	1	-	1
	Golongan III	5	1	6
	Golongan II	4	2	6
	Golongan I	-	-	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :			
	Diklatpim III	1	-	1
	Diklatpim IV	1	-	1

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu upaya mencapai target kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komposisi jumlah pegawai Bakesbangpol berdasarkan pada latar belakang pendidikan dapat dilihat jumlah pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan jumlah non sarjana. Dilihat dari jumlah komposisi diharapkan dapat memberikan andil yang cukup besar.

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Eselonering, Pangkat/Golongan Ruang
dan Jenjang Pendidikan
Per Januari 2023

Pangkat/Gol. Ruang		Jenjang Pendidikan		Eselonering	
Ivc	-	-	-	-	-
Ivb	1	S2	1	IIIa	1
Iva	1	S1	1	Iva	1
IIId	2	S1 dan S2	2	Iva	2
IIIC	-	-	-	-	-
IIIB	3	S1, AMd dan SMA	3	Iva	3
IIIa	-	-	-	-	-
IId	6	SLTA	6	-	-
IIC	-	-	-	-	-
IIB	-	-	-	-	-
IIa	-	-	-	-	-
Jumlah	13	Jumlah	13	Jumlah	5

Berdasarkan table tersebut diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebanyak 13 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 4 (empat) orang dan Golongan II sebanyak 8 (Delapan) orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 ()satu) orang. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana dan Diploma sebanyak 3 (Orang) orang dan sisanya SLTA sebanyak 9 (Sembilan) orang. Selanjutnya dari sisi eselonering Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tergolong Badan yang ramping struktur dibandingkan dengan OPD yang lain di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan gambaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan OPD yang ramping struktur dengan fungsi dan peranan yang sebanding dengan Badan, kemudian secara kuantitas jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta masih kurang memadai untuk ukuran sebuah OPD (Badan) tetapi bukan berarti secara kualitas tidak memadai. Hal ini bisa digambarkan dengan jenjang pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hampir 50 % telah

mengenyam pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang baik tentunya harus didukung dengan manajerial dan kebijakan - kebijakan serta perencanaan yang strategi berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten dan Kepala Daerah terpilih.

2.2.2 Asset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sangat *concern* terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai OPD pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagai gambaran berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah Gedung Badan, Kendaraan Dinas baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua), Ruangan rapat yang dapat menampung hingga 50 orang, serta aset berupa alat perlengkapan Badan yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan Bakesbangpol, Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel. 2.3
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesbangpol
Kabupaten Purwakarta, 2019 sd. 2023

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Ket.
I	1. Tanah			
	2. Bangunan			
II	KENDARAAN			
	1. Roda 4	Unit	1	
	2. Roda 2	Unit	6	
III	APK			
	Filling Kabinet	Unit	10	

	Lemari Besi	Unit	11	
	Kursi Rapat	Unit	7	
	Meja Rapat	Set	12	
	Kursi Lipat	Unit	27	
	Meja Kerja	Unit	27	
	Kursi Kerja Sandaran Rendah	Unit	4	
	AC (Air Conditioner) 2 PK	Unit	3	
	Dispenser	Unit	2	
	Sound Sistem	Unit	1	
	Sound Sistem Portable	Unit	2	
	Televisi	Unit	3	
	Mesin Potong Rumput	Unit	1	
	Komputer PC	Unit	15	
	Laptop	Unit	7	
	Scanner	Unit	1	
	Printer	Unit	14	
	Paper Shreeder (Mesin Penghancur Kertas)	Unit	3	
	Switch Hub (24s+2Q+)	Unit	6	
	Screen Infokus	Unit	1	
	Pintu Digital	Unit	2	
	Aula Ruang Rapat	Unit	1	

2.3. KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

Gambaran secara umum, kewajiban pemerintah adalah menyediakan pelayanan bagi setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan bagi warga negara yang telah memenuhi kewajiban terhadap negara, hak warga negara telah disebutkan dan konstitusi suatu negara, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta apabila dilihat pada urusan yang diembannya adalah melaksanakan urusan wajib pilihan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik. Operasional pelaksanaan urusan tersebut pada periode tahun 2024 - 2026 telah disusun perencanaan strategis yang dijabarkan oleh rencana kinerja tahunan pada setiap tahunnya dan dievaluasi melalui LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bakesbangpol memberikan pelayanan bukan hanya kepada publik (masyarakat) akan tetapi melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur pimpinan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat serta instansi vertikal yang terkait dengan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik,

2.3.1. PENCAPAIAN KINERJA BAKESBANGPOL

Pencapaian kinerja pelayanan beserta anggaran pendukung pelaksanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Secara kuantitas terdapat peningkatan yang signifikan antara capaian kinerja dan dukungan anggaran pendukung capaian kinerja dibandingkan antara capaian kinerja pelayanan pada awal tahun Renstra dan akhir tahun Renstra begitupun pada dukungan pembiayaan kinerjanya dimana secara rata-rata terdapat pertumbuhan dukungan anggaran.

Dicermati lebih jauh Renstra periode tahun 2024 - 2026 masih terdapat kekurangan sehingga menyulitkan dalam hal mengevaluasi dan menyesuaikan dengan target. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena terdapat restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan status organisasi.

Perubahan organisasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap proses perencanaan dan implementasi dari perencanaan tersebut. Hal ini menyebabkan perencanaan yang dibuat kurang maksimal dan tentunya masih dalam proses penyesuaian baik organisasi maupun aparaturnya. Hal tersebut terlihat dengan masih terdapat antara misi, sasaran, program dan kegiatan yang belum fokus dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan sasarannya.

Walaupun dari sisi perencanaan belum maksimal tetapi implementasi dari program dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat pada rasio capaian target per kegiatan dan program yang rata - rata mendekati 100 %. Capaian tersebut membuktikan keseriusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya target dan tahapan capaian pelaksanaan program dan kegiatan belum terencanakan dengan baik.

Dari sisi dukungan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta cukup mendapatkan dukungan anggaran yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel. 2.4 pada pertumbuhan rata-rata anggaran sebesar Rp. 2.365.456.272,- dan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.339.983,-. Walaupun begitu sebaran dukungan anggaran



tidak merata dan masih terdapat program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi dalam tahun anggaran tertentu disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel T.C 2.3
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022 Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan perlindungan masyarakat yang terlaksana			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00
	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Persen	100	100	100	100	96	98,79	100	100	0,96	0,98	1,00	1,00
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)			Persen	100	-	100	100	100	-	100	100	1,00	-	1,00	1,00
	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan			Persen	100	100	100	100	97,46	99,60	100	100	0,97	0,99	1,00	1,00
	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan			Persen	100	100	100	100	86	95	100	100	0,85	0,95	1,00	1,00

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan															
	Tingkat penyelesaian konflik sosial			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00
	Indeks kepuasan masyarakat			Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			Persen	70,98	69,27	72.7	74.45	70,98	69,27	72.7	74.45	0,70	0,69	0,72	0,74



Tingkat capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Renstra 2019-2022 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan indikator hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 8 aspek pelayanan yaitu Pembinaan, pencegahan, pelayanan, partisipasi dalam pemilu dan pencegahan konflik sosial, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana delapan unsur ini memperoleh nilai baik dan aspek Pengaduan/Saran dan Masukan memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.



2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.24.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.998.100.000	4.027.665.000	-	-	4.683.467.967	3.740.896.040	-	-	78%	99.82%	-	-		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	603.200.000	797.140.000	-	-	427.235.267	688.694.419	-	-	71%	86.40%	-	-		
Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	6.675.000	-	-	942.000	4.290.000	-	-	6,28%	64.27%	-	-		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000	93.000.000	-	-	45.276.348	47.689.441	-	-	60%	51.28%	-	-		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	41.400.000	-	-	-	41.400.000	-	-		100%	-	-		
Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	75.000.000	-	-	74.603.369	74.964.600	-	-	99%	99.95%	-	-		
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	65.000.000	68.650.000	-	-	64.691.950	67.756.450	-	-	100%	98.70%	-	-		
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	35.000.000	-	-	19.997.500	34.999.500	-	-	100%	100%	-	-		

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000	18.000.000	-	-	22.500.000	12.600.000	-	-	100%	70%	-	-		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	150.000.000	41.150.000	-	-	72.224.100	41.001.419	-	-	485	99%	-	-		
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	25.200.000	28.200.000	-	-	24.000.000	28.200.000	-	-	95%	100%	-	-		
Penyediaan Jasa piket malam	39.000.000	103.500.000	-	-	39.000.000	62.200.000	-	-	100%	60%	-	-		
Pengadaan peralatan Gedung kantor	50.000.000	104.000.000	-	-	49.900.000	103.600.000	-	-	100%	99%	-	-		
Fasilitas keberangkatan ormas, LSM dan Forum-forum ke luar daerah	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Festival purwakarta istimewa	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	-	100%	-	-	-		
Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	100%	-	-	-		
Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	39.000.000	-	-	-	39.000.000	-	-	-	100%	-	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	-	5.305.000	-	-	-	5.300.000	-	-	-	99%	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	49.900.000	26.500.000	-	-	16.252.700	22.829.500	-	-	33%	86%	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	70.000.000	50.000.000	-	-	70.000.000	47.440.000	-	-	100%	94%	-	-		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.000.000	20.860.000	-	-	15.085.000	20.860.000	-	-	60%	100%	-	-		

*Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026*



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan rencana kerja	7.500.000	10.000.000	-	-	7.250.000	10.000.000	-	-	97%	100%	-	-		
Penyusunan laporan inventarisasi barang milik daerah	7.500.000	10.000.000	-	-	7.250.000	10.000.000	-	-	97%	100%	-	-		
Sewa Gedung	120.000.000	-	-	-	120.000.000	-	-	-	100%	-	-	-		
Penyusunan pelaporan akhir kinerja instansi (LAKIP)	-	20.560.000	-	-	-	20.560.000	-	-	-	100%	-	-		
Premi asuransi pegawai non PNS	-	29.340.000	-	-	-	23.103.509	-	-	-	78%	-	-		
Penyusunan Perubahan Dokumen perencanaan perangkat daerah	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	100%	-	-		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	25.000.000	-	-	-	15.085.000	-	-	-	60%	-	-	-		
Penyusunan rencana strategis	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
PROGRAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.300.000.000		-	-			-	-			-	-		
Koordinasi pengamanan hari raya idul fitri, natal dan tahun baru	50.000.000	-	-	-	22.510.000	-	-	-		-	-	-		
Monitoring evaluasi belanja bantuan hibah dan sosial	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		

*Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026*



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan kader bangsa	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-	-	100%	-	-	-		
Jambore wawasan bagi pelajar	50.000.000		-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	300.000.000	294.100.000	-	-	286.980.000	284.280.000	-	-	96%	96%	-	-		
Sarasehan peningkatan wawasan kebangsaan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Forum pembauran kebangsaan	100.000.000	925.000	-	-	97.530.000	925.000	-	-	98%	100%	-	-		
Sawala wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Forum kerukunan umat beragama	150.000.000	150.000.000	-	-	148.280.000	146.580.000	-	-	99%	97%	-	-		
Pendidikan bela negara	-	300.000.000	-	-	-	299.955.920	-	-	-	99%	-	-		
PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAERAH	3.300.000.000	2.485.500.000	-	-	2.698.130.000	2.320.460.701	-	-	82%	93%	-	-		
Forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA)	1.000.000.000	1.360.500.000	-	-	952.500.000	1.208.785.000	-	-	95%	88%	-	-		
Koordinasi aparat intelijen (APINTEL)	350.000.000	350.000.000	-	-	329.120.000	350.000.000	-	-	94%	100%	-	-		
Tim terpadu penanganan konflik sosial kabupaten purwakarta	400.000.000	200.000.000	-	-	348.000.000	200.000.000	-	-	91%	100%	-	-		
Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	200.000.000	-	-	-	193.770.000	-	-	-	97%	-	-	-		
Koordinasi pengawasan	100.000.000	100.000.000	-	-	70.000.000	88.330.000	-	-	70%	88%	-	-		

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Satgas toleransi kabupaten purwakarta	500.000.000	275.000.000	-	-	432.950.000	274.915.701	-	-	87%	99%	-	-		
Pemberdayaan dan pengawasan oramas	100.000.000	-	-	-	3.830.000	-	-	-	4%	-	-	-		
Tim kewaspadaan dini daerah	400.000.000	-	-	-	363.990.000	-	-	-	87%	-	-	-		
Tim pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba (TP4GN)	100.000.000	-	-	-	3.970.000	-	-	-	4%	-	-	-		
PROGRAM POLITIK DALAM NEGERI	400.000.000	-	-	-	167.065.000	-	-	-	42%	-	-	-		
Monev bantuan keuangan bagi partai politik yang duduk di DPRD	25.000.000	-	-	-	8.940.000	-	-	-	36%	-	-	-		
Peningkatan pemahaman bagi pengurus parpol yang menerima bantuan	25.000.000	-	-	-	2.495.000	-	-	-	10%	-	-	-		
Pusat Informasi pemilu 2019	100.000.000	-	-	-	1.380.000	-	-	-	1%	-	-	-		
Tim pemantauan perkembangan politik daerah	100.000.000	-	-	-	28.000.000	-	-	-	28%	-	-	-		
Pemantauan pileg dan pilpres tahun 2019 (Banprov tahun 2019)	150.000.000	-	-	-	126.250.000	-	-	-	84%	-	-	-		
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran														

*Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026*



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	6.999.724	4,991,400	-	-	5,817,100	4,980,700	-	-	83%	99%		
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	6.994.069	5.008.800	-	-	6,581,787	5,001,700	-	-	94%	99%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	1.616.936.070	1.734.936.070	-	-	1,472,013,547	1,600,281,208	-	-	91%	92%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	6.999.810	5,007,600	-	-	5,537,200	4,985,250	-	-	79%	99%		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	6.999.811	5,007,600	-	-	6,637,343	4,989,150	-	-	94%	99%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	55,480,000	-	-	-	55,400,000	-	-	-	99%	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	49,999,724	20,000,050	-	-	49,999,677	19,979,050	-	-	100%	99%		
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	60,259,400	-	-	-	60,259,400	-	-	-	100%		
penyediaan alat rumah tangga	-	-	49,994,452	19,996,700	-	-	49,613,303	19,996,100	-	-	99%	100%		
penyediaan bahan logistic	-	-	149,999,876	71,902,746	-	-	148,546,504	71,902,687	-	-	99%	100%		

*Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026*



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	-	-	120,017,374	60,000,000	-	-	104,168,724	59,862,600	-	-	86%	99%		
fasilitas kunjungan tamu	-	-	19,950,000	10,100,000	-	-	19,950,000	10,100,000	-	-	100%	100%		
penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	149,640,000	50,174,000	-	-	55,370,000	50,148,757	-	-	37%	99%		
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	100,000,000	-	-	-	99,088,000	-	-	-	99%	-		
penyediaan jasa surat menyurat	-	-	12,660,000	10,000,000	-	-	11,218,000	9,520,000	-	-	88%	95%		
penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	-	-	63,600,000	70,498,565	-	-	52,670,733	59,356,261	-	-	82%	84%		
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	556,380,000	558,600,000	-	-	533,265,072	512,981,160	-	-	95%	91%		
penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	42,310,000	25,900,000	-	-	40,995,365	25,311,000	-	-	96%	97%		
pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	100,036,000	32,040,000	-	-	100,000,000	32,000,000	-	-	99%	99%		
pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung	-	-	39,760,000	15,320,000	-	-	39,630,000	15,320,000	-	-	99%	100%		

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	29,987,659	135,548,800	-	-	27,487,659	127,886,300	-	-	91%	94%		
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	-	-	29,966,047	1,933,389,541	-	-	25,466,041	1,930,589,541	-	-	84%	99%		

*Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026*



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	-	-	1,402,150,090	19,803,250	-	-	1,336,589,539	12,453,250	-	-	96%	62%		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														
Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	271,198,609	185,088,800	-	-	271,198,607	184,388,800	-	-	100%	99%		
Program Pembinaan dan Pengembanga Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya														
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat daerah	-	-	72,754,116	50,000,000	-	-	66,193,400	49,996,100	-	-	90%	99%		

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	-	-	39,752,486	11,530,250	-	-	33,602,486	9,530,250	-	-	84%	82%		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan didaerah	-	-	485,942,895	215,496,100	-	-	444,264,610	196,760,100	-	-	91%	91%		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial														

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di daerah	-	-	553,703,850	446,774,750	-	-	541,402,550	390,672,750	-	-	97%	87%		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	-	-	2,398,966,875	218,516,750	-	-	2,006,720,335	200,171,750	-	-	84%	91%		

Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	700,001,623	587,735,500	-	-	600,264,623	574,123,000	-	-	85%	97%		



Tingkat realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode Renstra 2019-2022 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 100% namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan realisasi 96% sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggaran hanya 93,73 % dan tahun 2022 realisasi anggaran naik kembali 96,90%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pembangunan masyarakat secara keseluruhan merupakan upaya dalam mencapai perubahan secara terukur dan terencana, mencakup perbaikan dari segi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social budaya agama serta kemasyarakatan dan perkembangan pemahaman demokrasi politik, Perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah, Selaras dengan program kabupaten, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan dan peluang dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal:

Kekuatan

1. Adanya sinkronisasi visi misi kabupaten dengan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan.
2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
3. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021.
4. Ketersediaan jaringan Kerjasama dengan instansi terkait dan vertikal
5. Adanya komitmen tujuan dan sasaran pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Kelemahan

1. Mekanisme SOP belum tersedia
2. Kualifikasi sumber daya yang belum sesuai sehingga dukungan dalam pelaksanaan tupoksi belum memadai.
3. Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan urusan pelayanan yang belum memadai
4. Dukungan anggaran yang belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
5. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, membuat jalannya demokrasi politik belum optimal



Faktor Eksternal :

Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang mempengaruhi jalannya perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah dan efisien.
3. Dukungan instansi terkait dan vertikal mempermudah kinerja pelayanan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Adanya sinkronisasi dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat
5. Potensi sumber daya forum- forum dan organisasi masyarakat di bawah fasilitasi Bakesbangpol
6. Program prioritas Kepala Daerah di bidang Kesatuan dan ketahanan bangsa

Ancaman

1. Dampak negatif dari globalisasi berdampak pada pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian akan proses demokrasi politik
2. Menurunnya ideologi kebangsaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
3. Adanya kepengurusan ganda dalam suatu organisasi yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik perpecahan
4. Semakin kritis masyarakat dalam menanggapi situasi dan kondisi daerah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu
6. Kurangnya penanganan dan deteksi dini dalam pelaksanaan pengamanan potensi konflik sosial yang terjadi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan Badan yang paling baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Namun eksistensi dan keberadaannya cukup dirasakan oleh masyarakat dan juga sangat mendukung dari program - program Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dimana program - program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus terealisasi dan tercover dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas organisasi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang meliputi SMD, sarana dan Prasarana, Serta perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SMD baik melalui pendidikan dan pembinaan bagi pegawai.
2. Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perencanaan rencana kerja tahunan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan data dan informasi berbasis web.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dikarenakan sering terjadi regulasi peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Belum optimalnya sumber daya manusia yang memadai dengan kebutuhan Bakesbangpol.

Terbatasnya jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hanya berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan beban tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan sesuai dengan perubahan Kantor menjadi badan, maka kebutuhan SDM masih jauh dari memadai

3. Keterbatasan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan jumlah anggaran pembangunan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai penunjang perencanaan prioritas dan kinerja pelayanan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitasi forum – forum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberadaan forum – forum yang di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik Kabupaten Purwakarta seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan penataan sarana dan prasarana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik agak terhambat dan masih banyak kekurangan sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Belum Optimalnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam negeri

Ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung penentuan kebijakan yang cepat dan tepat. Sampai dengan saat ini ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan proses demokrasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada bulan Juni 2018 telah terpilih pasangan Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta dimana Kepala Daerah merupakan incumbent pada periode masa jabatan sebelumnya. Sesuai dengan visi, misi dan program prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah



dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai masalah-masalah kemanusiaan, mulai dari masalah bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat



Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses



informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem.



Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan,



kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi kaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi dan program prioritas dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat digaris bawahi sebagai berikut :

1. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 serta sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka tugas dan fungsi Bakesbangpol terkait erat dengan pencapaian Misi



ke 2 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut :



(Tabel T-8 . 35)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan 2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 3. Budaya kerja Aparatur Pemerintah masih kurang memadai. 4. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya	1. Eksistensi dan legalitas lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung Peraturan Perundang-undangan 2. Adanya motivasi kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tinggi 3. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 4. Adanya dukungan dari atasan langsung.



3.3. TELAAHAN RENSTRA BAKESBANGPOL KABUPATEN DENGAN BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA BARAT

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsinya, adapun telaahan keterkaitan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.

Sasaran tersebut di implementasikan kedalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dimana arah kebijakan Bakesbangpol Jawa Barat pada dasarnya adalah untuk melaksanakan tugas dari Gubernur Jawa Barat sesuai dengan bidangnya.

Keselaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat dari :

1. Adanya keselaran antara program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rancangan yang telah di susun ;
3. Adanya Kerjasama antara Bakesbangpol Provinsi dan Bakesbangpol Kabupaten terkait pelaporan guna mendukung kebutuhan laporan bagi Gubernur ataupun bagi Kepala Daerah sendiri;

Secara umum terdapat keselaran antara sasaran dari instansi provinsi maupun Kabupaten, untuk lebih lanjut sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya per-tahunnya.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka openataan ruang wilayah kabupaten purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industry, pertanian, dan parawisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai Langkah pencapaian tujuan yaitu;



- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*)
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam system Kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten
- c. Pengembangan Kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, di dukung infrastuktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan Kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global;
- f. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahankan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penata ruang wilayah kabupaten ke dalam Langkah-langkah oprasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi;

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana polar uang, dan penetapan Kawasan strategis kabupaten purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas;

- a. Strategis Pengembangan kegiatan industry secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi;
 - 1) Menyediakan ruang Kawasan peruntukan industri yang memadai disekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan Kawasan industri di Kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung Bersama untuk kegiatan-kegiatan industri diluar Kawasan industri;
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industry ke lokasi Kawasan peruntukan industri/Kawasan industri;
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan dibagian selatan wilayah kabupaten



meliputi;

- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi Kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan Kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten;
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi Pengembangan Kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi;
- 1) Mengembangkan Kawasan wisata belanja dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan Kawasan wisata belanja budaya di Kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan Kawasan wisata air dan petualangan disekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke Kawasan wisata;
 - 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan Kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan Kawasan strategis meliputi :
- 1) Mengembangkan PKW, PKL, PKLP, PPK, PPL, terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - 2) Mengarahkan perkembangan Kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan social dengan lingkup pelayanan setiap Kawasan perkotaan;
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan,



limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.

- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi;
 - 1) Memantapkan perlindungan Kawasan hutan lindung;
 - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan dikawasan perkotaan
 - 3) Mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan lindung dan Kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas ditempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ;
 - 6) Merehabilitasi Kawasan bekas pertambangan.
- f. Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi;
 - 1) Mendukung penetapan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara
 - 2) Mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budidaya terbangun;
 - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,



dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan Program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, Keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan perubahan status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, penentuan isu strategis Bakesbangpol, maka dapat dirumuskan penentuan isu – isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kinerja
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Terjadinya peningkatan paham – paham dan kelompok radikal, khususnya yang terjadi melalui bidang teknologi informasi
4. Terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah yang berdampak pada menurunnya respon masyarakat dalam memahami terkait isu dan perkembangan politik.



5. Meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan miras di wilayah kabupaten purwakarta
6. Kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi anggota politik dan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Permasalahan dan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2024– 2026 dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mengacu kepada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran tersebut sebagai acuan dan operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai

4.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Mengacu kepada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran tersebut sebagai acuan dan operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table berikut :

4.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Masyarakat dan sumber daya aparatur penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU
3. Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat
4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T.C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77.95	79.70	81.45
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 disebutkan bahwa strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta dirumuskan dalam “**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**”. Strategi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta tersebut dalam mencapai tujuan atau mengatasi persoalan

Strategi merupakan cara atau langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan atau mengatasi sebuah persoalan, cara atau langkah di rumuskan terlebih dahulu dan merupakan sebuah rangkaian kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah Tindakan yang di ambil oleh pemerintah dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran atau maksud tertentu. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta mengacu pada tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai perangkat pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, memiliki tugas Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi, Fasilitasi dan Monitoring fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Purwakarta.

Sehingga Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program -program, Lebih jelasnya pernyataan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat tergambar melalui tabel berikut ini.

Tabel T.C.26
Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul karimah			
Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Efektif,, Efisien, Bersih Dari KKN Dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,efektif dan akuntable	1. Meningkatnya Akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	1. Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Capaian akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	1. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	1. Meningkatkan Sinergitas dan Solideritas dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat 2.Meningkatkan solediritas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat 3.Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyakarat 4.Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

5.1.1. Strategi

Berpedoman kepada rumusan tersebut dan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
2. Meningkatkan Sinergitas dan solidieritas dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

5.1.2. Kebijakan

Melalui strategi tersebut harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatkan solidieritas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Sebagai operasional dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 dijabarkan dalam penentuan program yang berkesinambungan dan sinkron dengan Visi dan Misi tersebut.

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Rencana Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6.2. Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
2. Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes).

Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik.

4. Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan
5. Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan
6. Tingkat penyelesaian konflik sosial



6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta antara lain :

1. Aparatur dan masyarakat Masyarakat forum – forum di Kesatuan Bangsa, Politik.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan dukungan alat pengukur strategis jumlah anggaran pada APBD sampai dengan tahun 2024 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 9,709,398,223



Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome &Kegiatan Output	Data capaian PD tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRenstra SKPD			
					2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	6		7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta				9.709.398.223		9.847.659.415		10.032.903.828					Purwakarta
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													Purwakarta
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun												Purwakarta
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000				Purwakarta
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000				Purwakarta
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000				Purwakarta
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000				Purwakarta



			Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun														Purwakarta
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	1,765,936,070		1,842,529,677		1,926,782,645						Purwakarta
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000						Purwakarta
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000						Purwakarta
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000						Purwakarta
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	100	100	100	10,000,000		10.500.000		11,000,000						Purwakarta
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															Purwakarta
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100	10,000,000		10,500,000		11,000,000						Purwakarta
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan														Purwakarta



Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	100	80,000,000		80,500,000		81,000,000						Purwakarta
			Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	10,000,000		10,500,000		11,000,000						Purwakarta
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum														Purwakarta
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	100	100	20,000,000		20,500,000		21,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	100	100	150,000,000		152,000,000		156,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	100	100	100	100,000,000		103,000,000		110,000,000						Purwakarta
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	150,000,000		152,000,000		156,000,000						Purwakarta
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SPKD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta



			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan														
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	100	100	200,000,000		263,000,000		207,000,000						Purwakarta
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	100	100	150,000,000		152,000,000		155,000,000						Purwakarta
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	100	100	100,000,000		100,500,000		104,000,000						Purwakarta
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100	100	100	150,000,000		152,000,000		156,000,000						Purwakarta
			Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	100	50,000,000		50,000,000		51,000,000						Purwakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan														Purwakarta
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	20,000,000		20,500,000		21,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	100	100	70,000,000		70,500,000		71,000,000						Purwakarta
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	100	100	542,698,664		542,698,664		542,898,664						Purwakarta
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara														Purwakarta



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30,000,000		30,500,000		31,000,000						
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai/	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan															Purwakarta
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaana	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														Purwakarta



Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	100	100	350,000,000	351,000,000	354,000,000							Purwakarta
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai/	Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.02	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik														Purwakarta
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Jumlah Peserta Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik													Purwakarta
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	umlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100	100	100	3,070,763,489	3,084,831,074	3,125,222,519							Purwakarta
			Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan				100,000,000	105,000,000	110,000,000							



			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik didaerah														
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai/	Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan															
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah Ormas yang Menyampaikan														
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing				250,000,000		252,000,000			254,000,000					Purwakarta
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai/	Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.05	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya															
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba														
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				100,000,000		103,000,000			105,000,000					Purwakarta



			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	100	100	50,000,000		50,500,000		51,000,000						Purwakarta
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	100	100	350,000,000		354,000,000		354,000,000						Purwakarta
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai/	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	8.01.06	ProgramPeningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial															Purwakarta



Rencana Strategi Badan Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta
Tahun 2024-2026

			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial															Purwakarta
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	100	100	150,000,000		152,000,000		154,000,000						Purwakarta
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	100	100	500,000,000		503,000,000		505,000,000						Purwakarta
			Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	700,000,000		702,000,000		703,000,000						Purwakarta

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, dilengkapi dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, indikator, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta adalah : **Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah.** Sedangkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta terdapat pada misi 1 (satu) yaitu : **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.**

Tujuan dari misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta adalah tujuan yang ke 2 (dua) yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.** Kemudian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL T.C.28
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	10
1	Capaian SAKIP perangkat daerah	A	A	A	A	-
2	Indeks kepuasan masyarakat	Baik	baik	baik	baik	-
3	Indeks kerukunan umat beragama	74.45	77.95	79.70	81.45	-



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 yang mengacu kepada RPD pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026. Indikator-indikator tersebut merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dan menunjukan pula hubungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan RPD Kabupaten Purwakarta.



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta namun secara lebih jauh adalah untuk menajamkan arah, gerak dan langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pemacu peningkatan produktivitas dan kinerja Sekretariat Daerah sebagai alat ukur Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak baik pimpinan maupun anggota organisasi.

Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan seluruh jajaran pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

YUS DJUNAEDI RUSLI S. STP. M. SI
NIP. 19790402 199810 1 001

LEMBAR VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

NAMA PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
1	SISTEMATIKA : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP	✓	
2	BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓ ✓ ✓ ✓	
3	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.	✓	

beberapa
- Sistem Perakuran
agar diseraikan

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).	✓	
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	✓	
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.	✓	
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	✓	
4	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik	✓	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	✓	
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.		
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.	✓	
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.	✓	
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana	✓	
5	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.	✓	
6	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.	✓	
7	BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.	✓	
8	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD/RPD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
9	BAB VIII PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
10	KESESUAIAN DENGAN RPJMD/RPD Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program Renstra PD dengan RPJMD/RPD	✓	✓

DATATAN TINDAK LANJUT :

- Agar sesuai? Bab disesuaikan dengan Perbup 55/2022, kemudian kan isi agar di selidiki.
- Tabel yang digunakan harus sesuai dengan Perbup 55/2022 dan isi datanya sesuai dengan RPD dan Kertas Kerja Renstra 2024 - 2026.
- Revisi dari Verifikasi sudah ditindak lanjut dan sudah, sesuai dan kemudian agar dilakukan pengecekan akhir antara Dokumen Renstra dgn RPD.

VERIFIKATOR,

(VERA YULIA PUTRI, SKM)
NIP. 19820909 200604 2 011

PURWAKARTA,
KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

(Ika Yulizah)
NIP. 19670409 200701 2 010

MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG.....

(Hermawan, SH, MSI)
NIP. 19660115 196010 1 002